



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA P)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 6 Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Surabaya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, terimakasih dan sebagai bahan lebih lanjut.

Surabaya, 12 Juni 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Surabaya



ACHMAD ZAINI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001161991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan.....	6
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	17
BAB IV Penutup.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	 12
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	 26

BAB I

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Surabaya di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Rancangan Akhir Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan bagi Perangkat Daerah (PD);
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Akhir Renja Perubahan PD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan Perangkat daerah (PD) yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya;

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023;

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 000.7/6908/436.8.1/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini menyajikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penilaian dilakukan terhadap indikator capaian output maupun serapan anggaran, guna mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan awal. Hasil evaluasi menunjukkan berbagai capaian yang telah direalisasikan oleh perangkat daerah, serta adanya beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan baik dari sisi target, pelaksanaan, maupun alokasi anggaran.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang telah mengalami perubahan, mencakup aspek lokasi pelaksanaan, target output yang ingin dicapai, serta pagu indikatif anggaran baik sebelum maupun setelah perubahan.

Perubahan Renja dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai Triwulan II, penyesuaian terhadap kebutuhan aktual, serta dinamika kebijakan pemerintah daerah dan nasional. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta memastikan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara optimal.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II

Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dirumuskan dalam 2 program yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adapun Program tersebut dilaksanakan dalam 6 Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II secara lengkap pada **tabel 2.1** dengan penjelasan sebagai berikut :

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, baik dari aspek pelaksanaan program maupun dari pencapaian indikator kinerja. Secara umum, kegiatan-kegiatan strategis telah berjalan sesuai rencana, dengan indikator outcome sebagian besar sudah tercapai, sementara realisasi anggaran dan output kegiatan berjalan bertahap dan siap untuk ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi dan tata kelola perangkat daerah. Dari total anggaran sebesar Rp33.615.722.000, telah terealisasi sebesar Rp6.315.937.000 atau sekitar 18,79%. Meskipun baru triwulan I, beberapa indikator sudah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.

Indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan melampaui target 97,5%, dengan realisasi sebesar 98,85%, bahkan melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 98%. Ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN tetap terjaga pada angka 100%. Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tercatat rata-rata 101 orang per bulan dari target 103 orang, atau sebesar 90,99%.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor juga telah berjalan baik, dengan kondisi 100% alat dalam keadaan layak pakai, serta 4 dari 17 paket telah disediakan atau 23,53%. Layanan penunjang kantor telah menghasilkan 3 dari 12 laporan, atau sebesar 25%.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini memiliki total anggaran sebesar Rp73.766.230.000 dengan realisasi hingga triwulan I sebesar Rp18.174.703.000 atau 24,63%. Capaian indikator outcome pada program ini sangat baik, karena hampir seluruh indikator seperti pelayanan terhadap warga terdampak penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, pembinaan PPNS, dan penindakan pelanggaran Perda dan Perkada, telah tercapai 100%.

Dari sisi kegiatan teknis, penanganan gangguan ketertiban umum menjadi kegiatan dominan, dengan alokasi Rp66.376.003.000 dan realisasi Rp17.278.237.000 atau 49,68%. Kerja sama dengan 11 lembaga telah berjalan, jumlah yang sesuai target. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM telah dilakukan sebanyak 47 kali dari target 192 kali (24,48%). Titik lokasi penertiban telah dilaksanakan di 110 titik atau 100% dari target, sedangkan pelayanan warga sekitar baru mencapai 320 dari 1.520 orang atau 21,05%.

Pada kegiatan pencegahan dan pembinaan, telah terealisasi 3 laporan dari 12 (25%), begitu pula untuk laporan hasil kerja sama dan laporan penindakan gangguan ketertiban. SDM Satpol PP dan Linmas yang telah dibina berjumlah 379 orang dari target 979 orang atau sekitar 38,75%. Penyusunan SOP juga telah menghasilkan 3 dari 12 dokumen atau sebesar 25%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.888.000 dari target Rp163.182.000 (17,95%).

3. Program Penegakan dan Pengawasan Perda/Perkada

Pelaksanaan program ini terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total anggaran sebesar Rp7.180.572.000, telah terealisasi sebesar Rp880.202.000 atau sekitar 12,26%. Objek pelanggaran Perda/Perkada yang ditindak telah mencapai 939 dari 4.230 objek (22,20%), dan objek yang disidik serta diselesaikan mencapai 29 dari 94 objek (30,85%).

Kegiatan penanganan pelanggaran telah menghasilkan 3 dari 12 laporan (25%), dan pengawasan kepatuhan juga telah menghasilkan 3 dari 12 laporan (25%). Namun, pada kegiatan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada, belum terealisasi laporan maupun serapan anggaran sehingga masih tercatat 0%. Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan triwulan berikutnya.

4. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kegiatan pembinaan PPNS juga menunjukkan arah yang baik. Dari target anggaran sebesar Rp209.655.000, telah terealisasi Rp16.264.000 atau 14,13%. Sebanyak 20 dari 70 PPNS telah mendapatkan pembinaan, dengan capaian 30,77%, dan laporan kegiatan yang dihasilkan sebanyak 1 dari 4 laporan atau 25%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan performa yang baik. Seluruh indikator **kinerja utama (outcome)** telah tercapai 100%, terutama dalam aspek pelayanan publik, penegakan hukum daerah, dan dukungan kelembagaan.

Capaian fisik dan keuangan yang rata-rata berada di kisaran 20–50% merupakan hal yang wajar di awal tahun anggaran dan memberikan ruang akselerasi pada triwulan selanjutnya.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 akan disusun dengan mempertimbangkan capaian positif ini, sekaligus mengatur strategi percepatan untuk kegiatan yang masih memerlukan perhatian lebih, seperti sosialisasi Perda, peningkatan jumlah pelayanan kepada warga terdampak, serta pemenuhan target laporan dan dokumen pendukung kegiatan. Dengan semangat kolaborasi dan pelayanan publik yang optimal, Satpol PP Kota Surabaya siap melanjutkan pelaksanaan program dengan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Berikut ini lampiran Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II K Rp. (000)	III K Rp. (000)	IV K Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.(000)										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
1.05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																			
1.05.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			37,856,081		28,432,881		33,615,722		6,315,937	-	-	-		6,315,937		6,315,937		16,68%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [761]	98 %		96.79 %		97.5 %		98.85 %	-	-	-	-		98.85 %		98.85 %		100.87%	
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			29,866,532				27,625,941		5,431,237	-	-	-		5,431,237		5,431,237		18.19%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [914]	100 %		100 %		100 %		100 %	-	-	-	-		100 %		100 %		100.00%	
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1490]			29,866,532				27.625.941		5.431.237	-	-	-		5.431.237		5.431.237		18,19%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5704]	111 Orang/bulan		103 Orang/bulan		103 Orang/bulan		101 Orang/bulan	-	-	-	-		101 Orang/bulan		101 Orang/bulan		90.99%	
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,438,855				3,242,323		435,890	-	-	-		435,890		435,890		9.82%	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik [1413]	100 %		100 %		100 %		100 %	-	-	-	-		100 %		100 %		100.00%	
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [2920]			4,438,855				3.242.323		435.890	-	-	-		435.890		435,890		9,82%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [5709]	17 Paket		17 Paket		17 Paket		4 Paket	-	-	-	-		4 Paket		4 Paket		23.53%	
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,550,694				2,747,457		448,810	-	-	-		448,810		448,810		12.64%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)												
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
						Persentase penyediaan jasa penunjang umum [1414]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
1.05.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [2921]			3,550,694			2.747.457		448.810		-		-		-		448.810		448.810		12,64%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [5710]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
1.05.02					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			38,444,848		77,914,627		73,766,230		18,174,703		-		-		-		18,174,703		18,174,703		47,27%
						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti [654]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
						Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya [1143]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
						Persentase PPNS yang dibina [1150]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada [1405]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
						Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani [596]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
1.05.02.2.01					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			34,779,392			66,376,003		17,278,237		-		-		-		17,278,237		17,278,237		49.68%	
						Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja [1875]	192 Kali		210 Kali		192 Kali		47 Kali		-		-		-		47 Kali		47 Kali		24.48%	
						Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam penanganan gangguan	11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		-		-		-		11 Lembaga		11 Lembaga		100.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)												
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
						ketentraman dan ketertiban umum [2142]																				
						Jumlah lokasi penerbitan pelanggaran Perda dan Perkada [916]	116 Titik/Lokasi		104 Titik/Lokasi		110 Titik/Lokasi		110 Titik/Lokasi	-	-	-	-	110 Titik/Lokasi		110 Titik/Lokasi		94.83%				
						Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan [2143]	1520 Orang		1296 Orang		1400 Orang		320 Orang	-	-	-	-	320 Orang		320 Orang		21.05%				
1.05.02.2.01.0006					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum [1508]			527,904			1.363.390		130.061	-	-	-	-	130.061		130.061		24,64%				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan [5705]	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen		3 Dokumen		25.00%				
1.05.02.2.01.0015					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan [3529]			31,434,907			59.931.094		16.142.179	-	-	-	-	16.142.179		16.142.179		51,35%				
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan [5712]	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan	-	-	-	-	3 laporan		3 laporan		25.00%				
1.05.02.2.01.0016					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban			2,167,280			2,176.670		520.984	-	-	-	-	520.984		520.984		24,04%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
					Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa [3530]																					
					Jumlah Laporan Gangguan Keterteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan [5713]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan	-	-	-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%					
1.05.02.2.01.0005					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia [1314]		464,625			2.476.254		441.925	-	-	-		441.925		441.925		95,11%					
					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya [5703]	978 Orang		1426 Orang		1279 Orang		379 Orang	-	-	-		379 Orang		379 Orang		38.75%					
1.05.02.2.01.0017					Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah [1296]		124,031			265.413		32.200	-	-	-		32.200		32.200		25,96%					
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan	-	-	-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)												
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
							Perkada yang Terlayani [5702]																				
1.05.02.2.01.0008						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat [3447]			60,646			163.182		10.888		-		-		-			10.888		10.888		17,95%
						Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan [5711]		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		-		-		-			3 Dokumen		3 Dokumen		25.00%
1.05.02.2.02						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			3,550,376			7,180,572		880,202		-		-		-			880,202		880,202		24,79%
						Jumlah objek pelanggaran perda dan perkara yang ditindak dan diselesaikan [2161]		4230 Objek		4975 Objek		4230 Objek		939 Objek		-		-		-			939 Objek		939 Objek		22.20%
						Jumlah objek pelanggaran perda dan perkara yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan [2160]		94 Objek		96 Objek		94 Objek		29 Objek		-		-		-			29 Objek		29 Objek		30.85%
1.05.02.2.02.0011						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah [1511]			1,865,433			4,955,041		731.184		-		-		-			731.184		731.184		39,20%
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP [5707]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-			3 Laporan		3 Laporan		25.00%
1.05.02.2.02.0012						Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah [1510]			417,432			958.019		149.018		-		-		-			149.018		149.018		35,70%
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-			3 Laporan		3 Laporan		25.00%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
							yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah [5706]																				
1.05.02.2.02.0010						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah [4699]			1,267,511			1,267.511		0	-	-	-			0			0			0,00%	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah [6883]		4 Laporan			4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan	-	-	-			0 Laporan			0 Laporan			0,00%
1.05.02.2.03						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			115,079			209,655		16,264	-	-	-			16,264			16,264			14,13%	
						Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas [1401]		65 Orang			79 Orang		70 Orang		20 Orang	-	-	-			20 Orang			20 Orang			30,77%
1.05.02.2.03.0006						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS [2909]			115,079			209.655		16,264	-	-	-			16,264			16,264			14,13%	
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda [5706]		4 Laporan			4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan	-	-	-			1 Laporan			1 Laporan			25,00%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam mendukung Visi Kota Surabaya 2021 - 2026, yaitu *"Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan"*. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya masuk dalam kategori Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih point 5. Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan. Dengan penjelasan : Mewujudkan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktifitas keseharian bagi warga Kota Surabaya. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra sebagai berikut :

TUJUAN :

1. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

- Indikator :

- Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan dengan target tahun 2025 adalah 82,96 %

SASARAN :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

- Indikator :

- Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan target di tahun 2025 adalah 81,91 Nilai

3.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan, adapun rencana program dan kegiatan dalam perubahan renja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja
- Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
- Target Capaian : 103 Orang/Bulan
- Pagu Indikatif : Rp. 87,016,990,729,-
- Alasan Perubahan : Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan perhitungan ulang terhadap beban belanja pegawai yang mempertimbangkan perubahan struktur ASN, termasuk penyesuaian pangkat/golongan dan potensi pengangkatan ASN baru, serta kebijakan tunjangan berbasis kinerja. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembayaran belanja pegawai secara tepat waktu dan akurat.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja	: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Target Capaian	: 17 paket
Pagu Indikatif	: Rp. 2,918,511,000,-
Alasan Perubahan	: Perubahan diarahkan untuk mendukung efisiensi kerja dan layanan administratif, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual peralatan penunjang kinerja, kondisi barang inventaris yang mengalami depresiasi, serta peningkatan kebutuhan operasional akibat ekspansi kegiatan lintas bidang pada Satpol PP.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan	: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Lokasi	: Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator Kinerja	: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan
Target Capaian	: 12 Laporan
Pagu Indikatif	: Rp. 2,148,144,572,-
Alasan Perubahan	: Disesuaikan untuk mengakomodasi beban kerja administratif yang meningkat seiring perluasan program kerja, dengan tetap menjamin kualitas layanan internal organisasi yang efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan unit kerja.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

- a. Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :

1. Sub Kegiatan

: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Lokasi

: Satuan Polisi Pamong Praja
- Indikator Kinerja

: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
- Target Capaian

: 1279 Orang
- Pagu Indikatif

: Rp. 1,680,609,084,-
- Alasan Perubahan

: Penyesuaian dilakukan berdasarkan urgensi peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam menghadapi tantangan ketenteraman dan ketertiban yang semakin kompleks. Kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pelatihan berbasis pendekatan HAM, hukum administratif, serta keterampilan teknis.
-
2. Sub Kegiatan

: Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Lokasi

: Satuan Polisi Pamong Praja
- Indikator Kinerja

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- Target Capaian

: 12 Dokumen
- Pagu Indikatif

: Rp. 1,300,273,778,-
- Alasan Perubahan

: Perubahan dilakukan untuk memperluas cakupan jejaring koordinasi lintas lembaga dalam upaya preventif dan kolaboratif,

termasuk dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat. Hal ini bertujuan membangun sistem pencegahan gangguan trantibum yang adaptif dan sinergis.

3. Sub Kegiatan

: Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Lokasi

: Satuan Polisi Pamong Praja
- Indikator Kinerja

: Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
- Target Capaian

: 12 Dokumen
- Pagu Indikatif

: Rp. 163,182,324,-
- Alasan Perubahan

: Penyesuaian diarahkan untuk merespons kebutuhan akan pembaruan SOP agar selaras dengan dinamika sosial dan regulasi terkini. Dokumen SOP ini menjadi kerangka kerja operasional dan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.
4. Sub Kegiatan

: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
- Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- Lokasi

: Satuan Polisi Pamong Praja
- Indikator Kinerja

: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Target Capaian : 12 Laporan

Pagu Indikatif : Rp. 50,825,214,362.-

Alasan Perubahan : Revisi ini ditujukan untuk memperkuat sistem mitigasi gangguan trantibum melalui pendekatan proaktif, dengan intensifikasi patroli, edukasi masyarakat, dan pendekatan partisipatif dalam pencegahan konflik sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan.

5. Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

Target Capaian : 12 Laporan

Pagu Indikatif : Rp. 2,176,669,800.-

Alasan Perubahan : Perubahan berdasarkan kebutuhan peningkatan kapasitas operasional dan logistik penegakan hukum daerah, dengan fokus pada akuntabilitas, proporsionalitas, dan prinsip non-diskriminatif dalam penindakan atas pelanggaran yang berdampak pada ketertiban publik.

- | | |
|-------------------|---|
| 6. Sub Kegiatan | : Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah |
| Indikator Kinerja | : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani |
| Target Capaian | : 12 Laporan |
| Pagu Indikatif | : Rp. 265,412,857,- |
| Alasan Perubahan | : Revisi diarahkan untuk menjamin ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat terdampak, dalam bentuk pendampingan, shelter, mediasi sosial, atau pelayanan sosial dasar yang relevan. Hal ini penting untuk memitigasi risiko sosial dari pelaksanaan penertiban. |
-
- | | |
|---|---|
| b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | |
| 1. Sub Kegiatan | : Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah |
| Lokasi | : Satuan Polisi Pamong Praja |
| Indikator Kinerja | : Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah |
| Target Capaian | : 4 Laporan |
| Pagu Indikatif | : Rp. 1,015,304,743,- |
| Alasan Perubahan | : Penyesuaian diarahkan untuk menguatkan pendekatan preventif melalui edukasi |

hukum kepada masyarakat. Sosialisasi ini bersifat strategis dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap produk hukum daerah.

2. Sub Kegiatan

: Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- Lokasi

: Satuan Polisi Pamong Praja
- Indikator Kinerja

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
- Target Capaian

: 12 Laporan
- Pagu Indikatif

: Rp. 4,167,470,212,-
- Alasan Perubahan

: Didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat aspek legalistik dan teknis dalam proses penindakan, agar penegakan hukum berlangsung sesuai prosedur tetap (SOP), serta memperhatikan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan keadilan sosial.
3. Sub Kegiatan

: Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Lokasi

: Satuan Polisi Pamong Praja
- Indikator Kinerja

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target Capaian : 12 Laporan
Pagu Indikatif : Rp. 958,019,397,-

Alasan Perubahan : Penyesuaian dilakukan guna memastikan bahwa pengawasan tidak bersifat reaktif, melainkan bersifat strategis dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan sistem pelaporan, evaluasi kepatuhan, serta integrasi dengan sistem pelaporan elektronik yang tersedia di pemerintah kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak Perda
Target Capaian : 4 Laporan
Pagu Indikatif : Rp. 209,655,137,-
Alasan Perubahan : Penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan penguatan profesionalisme PPNS dalam menjalankan fungsi penegakan hukum daerah. Fokus diarahkan pada pelatihan teknis investigasi, administrasi penyidikan, serta penguatan integritas dan pengembangan jenjang karier PPNS berbasis merit sistem.

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya pada 6 Kegiatan dan 13 sub kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,5 %	33,615,721,720	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,5 %	92,083,646,301	
	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	27,625,941,289	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	87,016,990,729	
	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	27,625,941,289	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	87,016,990,729	
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100 %	3,242,323,392	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100 %	2,918,511,000	
	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3,242,323,392	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,918,511,000	
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100 %	2,747,457,039	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100 %	2,148,144,572	
	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2,747,457,039	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2,148,144,572	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
2	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100 %	73,766,230,208	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100 %	62,761,811,694	
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %		
			Persentase PPNS yang dibina	100 %				Persentase PPNS yang dibina	100 %		
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %				Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %		
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %		
	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	66,376,003,440	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	56,411,362,205	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	110 Titik/Lokasi				Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	110 Titik/Lokasi		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali				Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali		
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang				Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang		
	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1279 Orang	2,476,253,675	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1279 Orang	1,680,609,084	
	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	1,363,390,416	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	1,300,273,778	
	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah	12 Dokumen	163,182,324	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah	12 Dokumen	163,182,324	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dibuat dan Dimutakhirkan					Dibuat dan Dimutakhirkan			
	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	59,931,094,368	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	50,825,214,362	
	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	2,176,669,800	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	2,176,669,800	
	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah	12 Laporan	265,412,857	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah	12 Laporan	265,412,857	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			
	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	7,180,571,631	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	6,140,794,352	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek				Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek		
	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	1,267,510,858	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	1,015,304,743	
	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	12 Laporan	4,955,041,376	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	12 Laporan	4,167,470,212	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kepala daerah Sesuai SOP					kepala daerah Sesuai SOP			
	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	958,019,397	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	958,019,397	
	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	70 Orang	209,655,137	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	70 Orang	209,655,137	
	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	209,655,137	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	209,655,137	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 12 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Surabaya



ACHMAD ZAINI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 197001161991011001